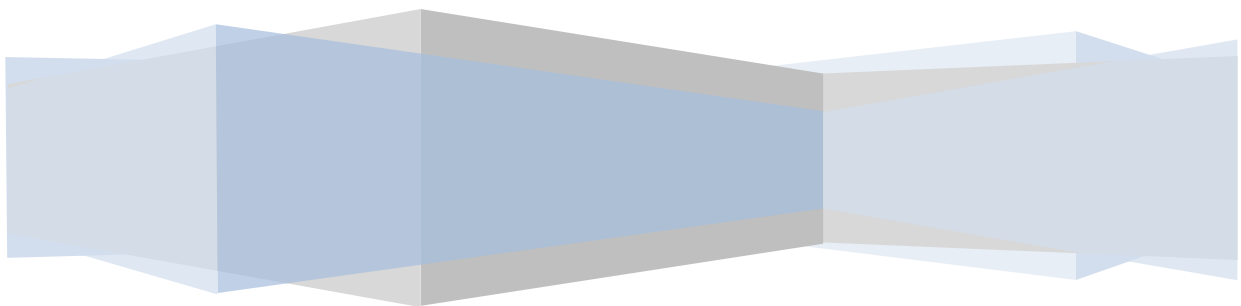




DOKUMEN RENCANA AKSI
SAKIP TAHUN 2017



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA



**FORMAT KERTAS KERJA PENYUSUNAN RTP PENYAJIAN LAPORAN KINERJA
PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH JAYA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
Jalan Mahkota Kuala Meurisi - Calang No. 03, Kode Pos 23654
Telp. (0654) 2210097, Fax. (0654) 2210099**

RENCANA AKSI UNTUK MENINGKATKAN NILAI SAKIP

KOMPONEN SAKIP	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG HARUS ADA	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	EFEKTIVITAS PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	BENTUK PEMANTAUAN YANG DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
Perencanaan Strategis	Perencanaan Jangka Menengah SKPK ada beberapa nilai target dari indikator yang perlu direvisi	Dokumen Renstra perlu direvisi	Beberapa nilai target dari indikator RPJMD yang direvisi	Proses revisi RPJMD/Renstra melibatkan semua komponen yang terkait Dokumentasikan seluruh hasil revisi	Belum Ada	Belum Ada	Membentuk tim lintas SKPD dengan koordinator Bappeda untuk melakukan indikator sasaran beserta targetnya, skala prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan telah berkesinambungan sekaligus memantau bahwa seluruh dokumen tersebut telah memenuhi komponen komponen evaluasi	Rapat Revisi Renstra (Notulen Rapat)	Tim Penyusunan Revisi Renstra (Sekretariat DPRK Aceh Jaya)	Bappeda dan Sekretariat DPRK Aceh Jaya	Revisi Renstra November 2017
Perjanjian Kinerja	Perjanjian kinerja yang disusun bukan merupakan perwujudan komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tupoksi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia	Tidak seluruh kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran Indikator kinerja sasaran belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Target kinerja belum ditetapkan dengan baik	Perjanjian Kinerja tidak mendukung keberhasilan visi dan misi pemda karena bukan tolok ukur kinerja	Kepala SKPK melakukan pembinaan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan masing-masing sesuai PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 Adanya pemutakhiran atas komponen perjanjian kinerja dalam hal terjadi perubahan FGD untuk menyelaraskan komponen perjanjian kinerja dengan dokumen perencanaan unit kerja di atasnya	Mensosialisasikan dokumen Perjanjian Kinerja kepada seluruh organisasi (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya)	Seluruh Anggota organisasi (Sekretariat DPRK Aceh Jaya) Mengetahui Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja di monitor pencapaiannya secara berkala Perjanjian Kinerja dilakukan revaluasi oleh Kepala SKPK	Rapat Evaluasi Kinerja (Notulen dan Absensi Rapat) Rapat Staf SKPK (Notulen dan Absensi Rapat Staf SKPK)	Evaluasi dari atasan langsung Kepala SKPK	Bupati dan Kepala SKPK SKPK terkait	Januari 2018
Pengukuran Kinerja	Capaian Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan yang sesungguhnya	Ada beberapa data Kinerja tidak dilengkapi Data Pendukung Sebagian Indikator kinerja sasaran tidak menggambarkan hasil	Tidak lengkapnya data pendukung	Kepala SKPK melakukan pembinaan dan pengembangan dan penetapan IKU di lingkungan masing-masing (Pasal 13 Peraturan MENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007)	Evaluasi Capaian Kinerja secara berkala triwulan/semester	Mengetahui hasil Capaian Kinerja secara berkala triwulan/semester	Kepala daerah dan Kepala SKPK menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi Dilakukan revaluasi terhadap IKU secara berkala Kepala SKPK menetapkan indikator kinerja sekurang-kurangnya indikator keluaran (output)	Rapat Staf SKPK (Notulen dan Absensi Rapat Staf SKPK) Rapat antar bidang di SKPK (Notulen dan Absensi Rapat)	Evaluasi dari atasan langsung Pemantauan oleh Kepala SKPK	Sekda dan Kepala SKPK SKPK terkait	Februari 2018

KOMPONEN SAKIP	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG HARUS ADA	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	EFEKTIVITAS PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	BENTUK PEMANTAUAN YANG DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
Pengelolaan Data Kinerja	Pengelolaan data kinerja belum memadai SDM kurang kompeten	Sistem pengumpulan data belum optimal Bukti-bukti pendukung kegiatan tidak didokumentasikan dengan tertib SDM belum pernah diikutkan dalam pelatihan SAKIP	Penyusunan laporan tidak didukung data yang valid	Menyusun SOP sistem pengumpulan data Lakukan reviu berjenjang terhadap laporan kinerja Peningkatan Kapasitas bagi SDM	Belum Ada	Belum Ada	Tersusunnya SOP dan peraturan tentang pengelolaan data kinerja serta sosialisasi kepada pegawai/bagian yang terkait dengan pengelolaan data kinerja Tersedianya SDM yang kompeten dan memadai	Surat Bupati/Kepala SKPK Rapat Staf SKPK (Notulen dan Absensi Rapat)	Monev Evaluasi oleh Kepala SKPK	Sekda/SKPK Kepala SKPK	Semester I 2018
Pelaporan Kinerja	Laporan Kinerja belum mencerminkan prestasi kerja yang sesungguhnya dicapai	Pengelolaan data kinerja belum memadai Laporan belum membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah Laporan kinerja belum membandingkan realisasi tahun ini dengan target Nasional (bagi yang telah memiliki SPM) Sebagian Laporan Kinerja belum menyajikan analisis keberhasilan dan kegagalan	Laporan Kinerja tidak dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai	SOP dan peraturan tentang pengelolaan data kinerja serta sosialisasi Pelaporan Kinerja sesuai dengan PerMenPan 53 Tahun 2014	Diintruksikan secara lisan	Belum memadai	Tersusunnya SOP dan peraturan tentang pengelolaan data kinerja serta sosialisasi kepada pegawai/bagian yang terkait dengan pengelolaan data kinerja	Laporan Sosialisasi Permenpan 53 Tahun 2014	Monev Kepala SKPK	Sekda	Sosialisasi Permenpan 53 Tahun 2014 dilaksanakan pada Oktober 2017 dan SOP pada Semester II 2018
Reviu dan Evaluasi Kinerja	Belum terdapat Pedoman reviu yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB	Tidak ada instruksi dari pimpinan untuk menyusun pedoman reviu sesuai Peraturan Kementerian PAN dan RB SDM yang ada kurang berkompeten	Hasil reviu kinerja belum optimal	Tersedianya pedoman reviu yang telah sesuai dengan pedoman Kementerian PAN dan RB	Belum Ada	Belum ada	Memantau tim penyusun pedoman reviu dan evaluasi	Instruksi Pimpinan	Monev	Sekretariat DPRK Aceh Jaya	Januari 2018

